

**OPINI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN  
SUNGAI DI DAERAH HILIR SUNGAI BERINGIN  
KOTA SEMARANG**  
(Studi Kasus: Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Mangkang Wetan)

**TUGAS AKHIR**

Oleh :

**LYSA DEWI ANGGRAINI**  
**L2D 303 295**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

## ABSTRAK

Permasalahan banjir yang terjadi di Sungai Beringin, merupakan suatu implikasi dari kurang optimalnya perencanaan pengelolaan sungai yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Seperti terjadinya perubahan tata guna lahan yang terjadi di daerah aliran Sungai Beringin, dari fungsi pertanian menjadi industri, permukiman baru serta perubahan tata guna lahan lainnya terutama di bagian hulu sungai merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab timbulnya banjir dan dirasakan dampaknya pada bagian hilir daerah aliran Sungai Beringin. Dengan adanya penyebab banjir tersebut, pemerintah telah merencanakan suatu program pengelolaan sungai dalam bentuk penanganan banjir, seperti pengerukan sungai, perbaikan sungai di jembatan Sungai Beringin dan rencana normalisasi dengan pembebasan lahan masyarakat di bagian hilir Sungai Beringin yaitu berupa tambak, sawah dan permukiman. Namun kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar pada tahap pelaksanaannya. Hal ini disebabkan didalam tahap perencanaan program, Pemerintah Kota Semarang kurang melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat kaitannya dengan tidak dipertimbangkannya usulan masyarakat dan kurangnya penyampaian informasi mengenai program pengelolaan sungai tersebut, sehingga tidak sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar Sungai Beringin. Untuk itu perlu dikaji bagaimana sebenarnya keterlibatan dan keinginan masyarakat di dalam program pengelolaan sungai yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dengan adanya kajian yang jelas, maka dapat diketahui opini serta arahan terhadap program pengelolaan Sungai Beringin sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kota Semarang didalam perencanaan program pengelolaan Sungai Beringin.

Studi Program Pengelolaan Sungai Didaerah Hilir Sungai Beringin ini bertujuan untuk mengidentifikasi program pengelolaan sungai didaerah hilir Sungai Beringin. Pendekatan studi yang digunakan dalam studi adalah dengan penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mendukung dalam interpretasi temuan dalam kuantitatif, yaitu dengan cara data-data yang telah diperoleh dari hasil atau jawaban pertanyaan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden tersebut akan ditabulasikan dengan menggunakan distribusi frekuensi. Setelah data-data tersebut diolah maka diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman (*comprehension*) dari penelitian ini.

Hasil analisis didapatkan bahwa sebagian besar masyarakat setuju terhadap program pengelolaan Sungai Beringin tersebut, namun masyarakat yang setuju tersebut mengajukan beberapa persyaratan dalam hal ganti rugi lahan yaitu masyarakat menginginkan harga tersebut disesuaikan dengan NJOP dan harga pasaran umum. Dalam penanganan banjir sebelumnya masyarakat hilir telah mengajukan usulan kepada pemerintah kota dalam upaya penanganan Sungai Beringin. Usulan masyarakat ini merupakan bentuk pandangan dan kritisi mereka terhadap bencana yang mereka hadapi. Melihat kenyataan yang ada, program-program yang telah dilakukan di dalam menanggapi usulan tersebut terbatas pada pengerukan serta perbaikan-perbaikan saja. Padahal jika pemerintah lebih dapat melakukan kajian-kajian lebih mendalam mengenai kondisi daerah aliran Sungai Beringin, hal ini tidak akan mampu mengurangi banjir karena berkaitan dengan kondisi muara yang menyempit. Hal ini menyebabkan salah satu program penanganan banjir yang saat ini sedang berlangsung mengalami hambatan seperti kurangnya respon masyarakat yang berkaitan dengan ganti rugi lahan, dalam hal ini pemerintah tidak melibatkan masyarakat di dalam tahap perencanaan program pemerintah, tetapi hanya melibatkan masyarakat untuk memilih program mana yang dikehendaki, sehingga dengan apa yang telah dilakukan pemerintah tersebut terjadi ketidakcocokan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penyampaian informasi.

Berdasarkan hasil analisis digunakan sebagai dasar memberikan arahan dalam kaitannya dengan program pengelolaan sungai didaerah hilir Sungai Beringin, antara lain pemerintah seharusnya memperbaiki daerah hulu yaitu di Kecamatan Mijen, tidak hanya daerah hilir saja yang terkena dampaknya, seperti perbaikan sistem drainase di perumahan-perumahan didaerah hulu yaitu dengan memperbaiki serta membuat sumur resapan untuk pengalihan limpasan air hujan dan juga mulai menghentikan pembangunan didaerah hulu (Mijen) yaitu dengan membuat suatu kebijakan. Selain itu, pemerintah kota perlu merubah strategi pengelolaan Sungai Beringin, yaitu dengan menerapkan pola pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat di dalam rangkaian rencana kerjanya termasuk di dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang dapat dilakukan secara kemitraan (*partnership*) antara masyarakat dengan pemerintah. Hendaknya kemitraan dilakukan lebih awal dalam proses perencanaan, sehingga masyarakat didaerah hilir Sungai Beringin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih awal dan penting, dan masyarakat dapat memahami lebih jauh akan program pengelolaan sungai didaerah hilir Sungai Beringin.

**Keywords:** *Opini Masyarakat, Program Pengelolaan Sungai, Manajemen Partisipatif*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan suatu kota diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Peningkatan kondisi perekonomian dan kemajuan sosial penduduk tersebut, akan berpengaruh terhadap struktur perekonomian dan infrastruktur kota (Conyers,1991:6). Apabila hal tersebut tidak dibatasi, maka akan dapat menyebabkan terlampauinya daya dukung suatu kota, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti adanya perubahan tata guna lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Salah satu bagian kota yang sangat terpengaruh dari adanya perubahan pola penggunaan lahan akibat adanya perkembangan pertumbuhan kota tersebut yaitu daerah aliran sungai (DAS).

Pada kondisi nyata dilapangan, pemanfaatan kawasan ini sering tidak sesuai dengan peruntukan fungsinya. Seperti halnya perubahan tata guna lahan yang dilakukan didaerah hulu sungai tidak hanya akan memberikan dampak didaerah yang mana kegiatan tersebut berlangsung, tetapi juga akan menimbulkan dampak didaerah hilir sungai seperti penurunan kapasitas tampung waduk, pendangkalan sungai dan saluran-saluran irigasi (Asdak, 2001:12) yang selanjutnya akan berdampak negatif baik terhadap masyarakat di dalam maupun diluar kawasan.



*BANJIR: Salah satu bentuk dampak negatif dari terlampauinya daya dukung suatu kota (SP)*

Salah satu dampak negatif dari kondisi tersebut yaitu terjadinya banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang terjadi pada suatu daerah yang dapat menimbulkan kerugian harta benda masyarakat, merusak bangunan prasarana dan sarana serta lingkungan hidup dan bahkan merusak tata kehidupan masyarakat (Kodoatie,et.al,2001:73). Seperti fenomena yang sedang terjadi saat ini, tidak hanya pada musim kemarau menimbulkan masalah kekeringan dan krisis air, tetapi juga pada saat memasuki musim hujan akan terjadi masalah melimpahnya air permukaan pada sungai yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan yang diakibatkan banjir mencapai dua pertiga dari semua bencana alam yang terjadi. Setiap tahun hampir 300 peristiwa banjir yang mengakibatkan tergenangnya 150.000 hektar lahan serta merugikan sekitar satu juta orang (Direktorat Sungai tahun 2000).



*BANJIR: Bencana banjir yang mengakibatkan areal tambak dan sawah warga tergenang air (DPU Kota Sng)*

keseimbangan sungai. Apabila perubahannya lebih besar dari angka tersebut, akan menyebabkan kenaikan tajam kuantitas debit aliran dan sedimentasi pada sungai yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya pendangkalan dan banjir besar di bagian hilirnya (Kodoatie, et.al, 2001:54). Banjir yang terjadi di Kota Semarang tersebut lazim disebut dengan banjir kiriman akibat dari luapan sungai-sungai yang berada di dataran tinggi. Salah satu sungai di wilayah Kota Semarang yang mengalami kondisi ini yaitu Sungai Beringin.

Luapan air yang terjadi pada Sungai Beringin, disebabkan pemanfaatan daerah aliran sungai yang tidak terkontrol dikarenakan adanya perubahan guna lahan di daerah atas (hulu), sehingga menyebabkan aliran sungai tidak berfungsi dengan baik. Perubahan penggunaan lahan tersebut tercermin dari keberadaan aktifitas-aktifitas baru, seperti terdapatnya perumahan, perindustrian, serta adanya kegiatan pengurangan sawah, tegalan dan pembabatan hutan karet.



*TANGGUL: Warga Mangkang Wetan sedang memperbaiki tanggul Kali Beringin Yang Bobol, mengakibatkan puluhan areal tambak rusak (SM)*

Beringin ada baiknya jika pemerintah kota juga melibatkan masyarakat sebagai pihak yang menempati ruang kawasan tersebut. Dengan keterlibatan tersebut masyarakat dapat ikut merasa memiliki serta bertanggung jawab atas kondisi sungai di wilayahnya, namun pada kenyataannya

Begitu pula halnya yang terjadi di Kota Semarang. Kota Semarang merupakan suatu wilayah yang cukup unik karena memiliki dua daerah dengan perbedaan kemiringan yang sangat besar yaitu Semarang atas dan Semarang bawah. Dengan kondisi topografi ini maka daerah bawah akan sangat sensitif dengan perubahan tata guna lahan di Semarang atas. Menurut Bledsoe dengan hanya perubahan tata guna lahan sebesar 5 % wilayah Semarang atas akan mengalami terganggunya

Disamping hal tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat setempat akan arti penting sungai turut menjadi pemicu atas terjadinya banjir sebagaimana tercermin dari adanya kegiatan pembuangan sampah di tepian sungai, penebangan hutan dan pendirian bangunan di daerah bantaran sungai yang dapat mengakibatkan terganggunya aliran sungai.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan suatu konsep pengelolaan sungai yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, sehingga di dalam pengelolaan Sungai

program pengelolaan sungai dalam kaitannya dengan penanganan banjir yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, seringkali tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan kurang adanya keterlibatan masyarakat. Kekurang konsistenan Pemerintah Kota Semarang tersebut terlihat dari beberapa program pengelolaan sungai yang telah dilaksanakan yang belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, sebagaimana tersaji pada beberapa kondisi sebagai berikut:

- 1) Pengerukan sungai yang dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2001 yang menelan biaya hampir sampai Rp 100 juta. Kegiatan ini tidak melibatkan masyarakat dan terkesan asal-asalan sehingga justru menimbulkan pendangkalan sungai (sumber: Suara Publik/Edisi Kedua/Februari 2003).
- 2) Perbaikan sungai di jembatan Sungai Beringin dikeluhkan karena tidak berkoordinasi dengan masyarakat setempat sehingga pelaksanaannya merugikan kepentingan masyarakat, kegiatan ini berlangsung di Kampung Ngebruk, Kelurahan Mangkang Wetan (sumber: Suara Merdeka/4 Februari 2003).
- 3) Normalisasi Sungai Beringin yang telah direncanakan Pemerintah Kota Semarang di Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Mangkang Wetan belum berjalan lancar. Permasalahan ini dilatarbelakangi adanya masyarakat sekitar menolak kebijakan tersebut dalam kaitannya dengan pembebasan lahan pada sisi Sungai Beringin selebar 53 meter dengan memakan banyak lahan warga sekitar yang berupa tambak, sawah dan permukiman (Sumber: Hasil Preliminary Survey, 2004).



*TALUD: Pemasangan talud oleh masyarakat dengan terucuk bambu di dinding sungai yang telah dikeruk, namun sifatnya hanya sementara (Observ)*

Hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa proses pengambilan kebijakan baik dalam hal perencanaan maupun pengambilan keputusan bersifat sepihak, dalam arti kurang melibatkan masyarakat disekitar sungai secara aktif khususnya dalam hal penyampaian gagasan atau usulan di dalam rencana penanganan banjir di Sungai Beringin. Dalam kasus tersebut, masyarakat tepian aliran Sungai Beringin masih dianggap sebagai objek dari kegiatan pengelolaan dan belum diperlakukan sebagai bagian dari *stakeholder* yang

mempunyai peran sama penting dengan pemerintah dalam upaya penanganannya.

Program pengelolaan sungai dalam bentuk kegiatan penanganan banjir tersebut dapat berjalan secara optimal apabila telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa 'Penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat' serta Peraturan